



MUDIK AWAL DI BANDARA SOEKARNO HATTA

Calon penumpang pesawat udara berjalan di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (2/5). Sebagian masyarakat memilih mudik lebih awal guna menghindari masa larangan mudik sejak 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Ibu Hamil Ditandu 4 Km ke Puskesmas, Sempat Jatuh dan Bayi Meninggal

Saat akan dibawa ke puskesmas, kondisi jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda dua atau maupun roda empat. Akhirnya, hasil musyawarah pemuda dan keluarga, ibu hamil tersebut disepakati ditandu menggunakan sarung dan bambu.

PANDEGLANG (IM)-

Peristiwa memprihatinkan terjadi di Pandeglang, Banten, Sabtu (1/5). Seorang ibu hamil yang ingin melahirkan terpaksa ditandu sejauh 4 Km untuk sampai ke puskesmas, karena akses jalan di sana belum bisa dilalui kendaraan.

Ibu yang tengah hamil bernama Enah (30), warga Kampung Lebak Gedong, Desa/Kecamatan Sindangresmi. Dia

terpaksa ditandu para pemuda menggunakan sarung dan bambu untuk mencapai lokasi yang bisa dijangkau mobil.

Salah seorang pemuda desa sekitar, Muhammad Rizal Saefulloh, menceritakan awalnya mereka mendapat laporan dari warga mengenai adanya seorang ibu hamil yang akan melahirkan.

"Iya itu tetangga kampung, Kemarin itu pas habis zuhur jam 01-an kira kira.

Ibu Enah di rumahnya sudah nggak tahan mau melahirkan. Sudah gitu, nelpun ke teman-teman pemuda di sini. Kita ke sana kita liat kondisinya sudah memprihatinkan," ujarnya saat dihubungi, Minggu (2/5).

Saat akan dibawa ke puskesmas, kondisi jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Hasil dari diskusi pemuda dan keluarga, ibu hamil tersebut terpaksa ditandu menggunakan sarung dan bambu.

"Kita mau bawa pakai kendaraan, cuma karena jalan yang tidak layak yang tidak bisa dijangkau kendaraan roda dua atau roda empat. Akhirnya kita berdiskusi dengan keluarga, karena ibunya sudah tidak kuat sekali, akhirnya hasil diskusi kita simpulkan untuk ditandu. Dari kampung Lebak Gedong ke Kampung Sawit, yang jaraknya kisaran 3 sampai 4 kilo,"

kata Rizal.

Di tengah perjalanan, sarungnya robek. "Di perjalanan itu, karena memang tidak kuat ini sarungnya menahan beban ibu hamil yang kita tandu pakai sarung dan bambu, robek di jalan tanpa kita ketahui sebelumnya. Sampai jatuh ibu hamilnya, kita ganti kembali kita bawa," ungkap Rizal.

Sesampai di Kampung Sawit dan telah ada akses jalan yang dapat dilalui dengan kendaraan roda 4, Enah dibawa menggunakan mobil ke puskesmas.

"Pakai (mobil) teman-teman di sini, aksesnya ke puskesmas sudah bisa dilalui mobil, 4 kilo itu (ditandu) dari Lebak Gedong ke Kampung Sawit," ungkapnya.

Saat tiba di puskesmas, kehamilan ibu Enah sudah masuk ke bukaan 4. Tenaga medis di

sana pun melakukan pemeriksaan. "Setelah itu ibunya meminta izin ke kamar mandi. Saat di kamar mandi keluar anak yang pertama dan meninggal di tempat. Setelah itu ditidurkan kembali diperiksa lagi oleh bidannya, ternyata ada satu lagi di dalam. Dibantu kembali (melahirkan), ternyata dua-duanya sudah tidak bisa tertolong bayinya," ujar Rizal.

Berdasarkan hasil diagnosa di puskesmas, kedua bayi kembar tersebut meninggal akibat kelebihan air ketuban, dan juga kondisi kandungan masih berukuran 6 bulan. "Hasil diagnosa di sini, itu karena kelebihan air ketuban. Mengamur umur kandungannya baru 6 bulan," jelasnya.

Mengenai biaya persalinan Enah di puskesmas, seluruhnya menggunakan Jamskesmas dana BPJS. Kini dia telah kembali ke rumahnya. ● pra

100 Sekolah di Kota Tangerang Ikuti Program Adiwiyata

TANGERANG (IM)- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang melakukan pembinaan kepada 100 sekolah yang siap mengikuti program Adiwiyata tahun ini.

"Program Adiwiyata merupakan upaya Pemkot dalam membangun lingkungan yang mampu menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah. Sehingga kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab, dalam upaya-upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Tihar Sopian dalam keterangannya di Tangerang, Sabtu.

Tihar mengungkapkan sejak 2011 hingga saat ini tercatat sudah 391 sekolah yang menandatangani status Adiwiyata di Kota Tangerang dengan rincian 335 tingkat SD negeri, 28 tingkat SMP negeri dan 28 SD dan SMP swasta. Dari 391 sekolah Adiwiyata, 167 di antaranya adalah Adiwiyata tingkat

Provinsi Banten, 39 sekolah tingkat nasional, dan 11 sekolah tingkat Adiwiyata mandiri.

"Kami harap, jumlah ini akan terus meningkat dan bisa terus sama-sama berkomitmen. Terus melakukan aksi kolektif secara sadar, sukarela dan berkelanjutan. Mulai dari kebersihan sanitasi, drainase, pengelolaan sampah, penanaman atau pemeliharaan sampah hingga inovasi penerapan perilaku ramah lingkungan hidup," katanya.

Tihar berharap Adiwiyata bukan hanya menjadi ajang perlombaan namun lebih bisa mengubah pola perilaku sekolah dalam berperilaku berbudaya lingkungan hidup yang berkelanjutan.

"Sekolah yang sudah Adiwiyata harus mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya, terlebih bisa menjadi virus positif bagi sekolah-sekolah lainnya, lingkungan lainnya, sehingga Kota Tangerang kian bersih, asri, sejuk dan kian sukses menjadi kota yang layak dikunjungi," katanya. ● pp

Parkir di Lahan Kosong, 5 Bus Terciduk Satpol PP Hendak Angkut Pemudik

TANGERANG (IM)- Warga Jawa Tengah di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (2/5) pagi memilih mudik lebih awal. Mereka khawatir tidak bisa pulang ke kampung halaman karena larangan mudik pemerintah.

Untuk menghindari pemeriksaan Covid-19, para pemudik dan lima armada bus yang mereka gunakan berkumpul di lahan kosong jauh dari jalan raya. Petugas Satpol PP yang mengetahui hal ini langsung memberi imbauan dan membubarkan mereka.

Para pemudik yang akan menuju Brebes, Pemalang dan Purwodadi ini sengaja memilih lahan kosong jauh dari jalan raya untuk menghindari pemeriksaan Covid-19.

Salah seorang pemudik, Sumarno mengatakan, adanya

larangan mudik pada tanggal 6 Mei mendatang membuat mereka memilih mudik lebih awal agar bisa berkumpul dengan keluarga saat lebaran.

Adanya persyaratan membawa surat bebas Covid-19 bagi pemudik membuat mereka terpaksa berkumpul di tempat yang jauh dari jalan raya dan jangkauan petugas.

Kasi Trantib Kecamatan Pagedangan, Jamal mengatakan, petugas Satpol PP Kecamatan Pagedangan yang mengetahui hal ini langsung mendatangi para pemudik agar mengurungkan niatnya untuk kembali ke kampung saat pandemi.

Karena tidak memiliki surat bebas Covid-19 dan membuat kerumunan di masa pembatasan kegiatan masyarakat, para pemudik ini pun akhirnya dibubarkan petugas Satpol PP. ● pp

Forwat Gelar Bukber dan Santuni Anak Yatim dan Piatu

TANGERANG (IM)- Forum Wartawan Tangerang (Forwat), menggelar acara bukber dan santuni anak yatim dan piatu yang digelar di Jalan Teuku Umar, RM H. Aten Sutan, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Jumat (30/4) lalu.

Hadir di acara Santunan anak yatim/piatu itu Camat Karawaci, Wawan Fauzi dan Anggota DPRD Kota Tangerang dari Komisi I Fraksi PDI Perjuangan, Andri S. Permana.

Dalam sambutannya, Camat Karawaci, Wawan Fauzi berkesempatan memperkenalkan dirinya lantaran baru menjabat menjadi Camat Karawaci, namun demikian ia bukanlah orang baru di Karawaci karena 4 tahun lalu pernah menjabat sebagai Sekcam Karawaci.

"Untuk rekan-rekan awak media yang belum kenal, nama saya Wawan Fauzi stok lama tapi juga pendatang baru sekarang ini," kata Wawan kepada awak media dan tamu undangan yang hadir.

Ia menceritakan, bahwa 4 tahun lalu dirinya pernah men-

jabat sebagai Sekcam selama 2 tahun bersama dengan Kiki Wibawa yang menjabat sebagai Camat Karawaci di tahun 2015 sampai 2017.

"Selanjutnya saya pindah ke Batu Ceper selama 2 bulan, lalu ke Satpol PP selama 4 tahun dan sekarang kembali ke Kecamatan Karawaci," ujarnya.

Ia juga meminta dukungan moril, informasi dan publikasi dari rekan-rekan Forwat. Karena menurutnya, tidak mungkin kegiatan-kegiatan pemerintah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya transfer informasi kepada masyarakat.

"Masyarakat perlu tau apa yang sudah dilakukan pemerintah, kegiatan hari ini pun juga layak untuk diinformasikan kepada masyarakat, karena di tengah kesibukan rekan-rekan masih punya sisi-sisi kemanusiaan yang terus harus dijaga, yakni di bulan Ramadhan ini bisa berbagi dengan saudara-saudara lainnya," tuturnya.

Wawan mengatakan, bahwa kegiatan yang dilakukan Forwat patut diapresiasi, dan ia juga mengapresiasi kehadi-

ran Anggota DPRD Kota Tangerang, dari Komisi I Fraksi PDI Perjuangan, Andri Permana, yang juga temannya di Palang Merah Indonesia.

Selain dukungan, Wawan juga meminta untuk bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk masyarakat kota Tangerang. "Jangan sungkan-sungkan, mari kita saling silaturahmi, bisa sewaktu-waktu saya mampir ngopi di sini atau Pak Ketua Forwat dan rekan-rekan yang mampir ke Kantor Kecamatan ngopi," kata Wawan.

Sementara anggota DPRD Kota Tangerang, Andri S. Permana berharap Allah SWT tetap menjaga seluruh yang hadir dari tahun pandemi (tahun yang sulit). Tahun di mana kebersamaan itu menjadi hal yang mahal.

Pengurus dan anggota Forwat yang hadir dalam acara tersebut adalah, Ketua Forwat Andi Lala, Wakil Ketua Forwat Selly, Bendahara Sarinan dan Sekertaris Johan beserta seluruh wartawan yang tergabung di Forwat dari Korwil Kota Tangerang, Tangsel dan Kabupaten Tangerang. ● joh

Tugu Pamulang Dibiarkan Berdiri, Tunggu Kepastian Revitalisasi

TANGSEL (IM)- Nasib Tugu Pamulang yang bentuknya menjadi polemik di masyarakat kian tak jelas. Tugu tersebut kini tampak dibiarkan berdiri begitu saja dan hanya ditutupi Seng di bagian bawahnya.

Rencana pembongkaran tugu yang sebelumnya diungkapkan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumi dipastikan batal dengan sejumlah alasan. Pembongkaran itu dimaksudkan agar tak ada lagi polemik di masyarakat sampai nantinya direvitalisasi dan dibangun Tugu Pamulang dengan bentuk terbaru.

Namun, wacana revitalisasi dengan menghadirkan bentuk baru Tugu Pamulang belum dapat dipastikan waktu pelaksanaannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Tranggono menjelaskan, pembongkaran dibatalkan karena Tugu Pamulang sudah tercatat sebagai aset pemerintah provinsi. Selain itu, pihaknya memastikan bahwa bentuk tugu yang berdiri saat ini sudah sesuai dengan rancangan awal pembangunan pada 2018. "Setelah kami kaji, itu kan tugu sudah selesai, sesuai dengan gambarnya dan masuk dalam aset provinsi. Kalau dibongkar berarti kan harus penghapusan aset," ujar Tranggono.

Alasan pembatalan pembongkaran Tugu Pamulang juga sudah disampaikan kepada Andika. Sebab, wacana pembongkaran tersebut disampaikan langsung oleh Andika ketika bentuk Tugu Pamulang banyak dicibir masyarakat. "Jadi kami berpikir juga untuk optimasi, kami juga izin sampaikan ke Pak Wagub, Pak mohon izin yang ini jangan dibongkar," ucap Tranggono.

Terlebih lagi, kata Tranggono, Pemerintah Provinsi Banten berencana melakukan revitalisasi Tugu Pamulang. Pihaknya juga menggelar sayembara desain, agar bentuk baru tugu tersebut bisa sesuai dengan keinginan masyarakat. "Jadi jangan ada dibongkar terus nanti bangun lagi. Jadinya kan mubazir itu," kata dia.

Meski begitu, Tranggono belum dapat memastikan sayembara desain maupun revitalisasi Tugu Pamulang dapat mulai dilakukan. Hingga kini, sayembara yang dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait bentuk baru Tugu Pamulang belum bisa digelar.

Menurut Tranggono, pihaknya masih membahas mekanisme dan administrasi penyelenggaraan sayembara rancangan baru Tugu Pamulang. "Jadi mekanisme sayembara ini kami lagi kaji. Administrasiya lagi kami siapkan. Kan harus ada panitia dan sebagainya," ucapnya.

Sementara itu, kendala utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Banten untuk merevitalisasi tugu tersebut adalah belum tersedianya anggaran. ● pp

JELANG LEBARAN RAZIA DIGENCARKAN Dinas Sosial Kota Tangerang Bakal Pulangkan Gepeng ke Daerah Asal

TANGERANG (IM)- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang siap menerima gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Suli Rosadi mengatakan akan melakukan pemilihan terhadap Gepeng yang terjaring razia berdasarkan domisili.

Dirinya menuturkan, bila yang bersangkutan bukan merupakan warga Kota Tangerang, maka pihaknya akan mengirimkan Gepeng tersebut ke Dinas Sosial di mana mereka tinggal berdasarkan alamat sesuai yang tertera di KTP. "Bila ternyata warga Kota Tangerang maka kami akan menyalurkan tempat singgah selama 7 hari dengan prosedur proses 34 orang," ujar Suli, Sabtu (1/5) malam.

Suli mengatakan, bila nanti Gepeng yang terjaring razia jumlahnya melebihi kapasitas rumah singgah yang ditentukan, maka pihaknya akan mengirimnya ke tempat penampungan milik Kementerian Sosial.

"Bila hasil penjarangan tidak dapat menampung, maka dari pihak Kemensos bersedia untuk menyediakan tempat penampungan bagi yang terjaring," katanya. Saat ini, lanjut Suli, pihaknya rutin melakukan komunikasi dengan Balai-balai terkait pelaksanaan di rumah singgah dan rumah perlindungan yang merupakan program atensi dari Kementerian Sosial. "Bidang Rehabsos (Rehabilitasi Sosial) Dinsos Kota Tangerang sudah melakukan komunikasi intens dengan Balai-balai. Apalagi mereka sangat apresiasi dengan kita terkait pelaksanaan di rumah singgah dan rumah perlindungan," jelasnya.

Seperti diketahui, menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah Gepeng mulai menjamur di setiap titik di Kota Tangerang. Moment jelang hari Raya Idul Fitri sering dimanfaatkan oleh para Gepeng untuk mencari keuntungan dari belas kasih warga dengan cara mengemis. ● pp

Kepala Daerah Dapat THR Tahun Ini, Bima Arya: Saya akan Sumbangkan

BOGOR (IM)- Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengaku belum mempelajari terkait rencana pemerintah memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi kepala daerah. Namun menurutnya, jika THR itu diberikan maka ia akan menyumbangkannya kepada yang lebih membutuhkan.

"Saya belum mempelajari itu ya. Kalau secara pribadi sih, saya akan sumbangkan untuk yang membutuhkan, paling tidak untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan," kata Bima Arya ditanya terkait pendapatnya soal THR untuk kepala daerah, Minggu (2/5).

Bima juga mengimbau kepada seluruh ASN di Kota Bogor untuk tetap bisa berbagi, terutama untuk pihak-pihak yang terdampak Covid-19. "Saya juga mengimbau kepada seluruh ASN-ASN yang sudah berkecukupan, tentu ada baiknya mendermakan itu, berbagi kepada yang membutuhkan, bisa kepada dhuafta, bisa yatim piatu, bisa yang putus kerja karena Covid-19, bisa yang membutuhkan karena long Covid-19," imbau Bima.

"Ini tidak wajib, tapi Insyaallah saya akan mencontohkan itu," imbuh Bima. Terkait kebijakan THR untuk kepala daerah, kata Bima, sebaiknya dikaji kembali. Karena pemberian THR di masa pandemi, di mana banyak orang yang terdampak, tentu menimbulkan pro dan kontra. "Iya sebetulnya itu kalau dalam keadaan normal itu bisa dipahami, tapi dalam keadaan Covid-19 seperti sekarang ini tentu ya harus dikaji lagi," kata Bima. Sebelumnya, Presiden Jokowi meneken PP Nomor 65 tahun 2021 tentang THR untuk PNS. Pihak mendapatkan THR selain PNS antara lain TNI-Polri, pejabat negara hingga pensiunan PNS. Dalam PP tersebut, yang dimaksud dengan pejabat daerah, salah satu di antaranya adalah Wali Kota / Bupati. "Ya saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 utk aparatur negara baik itu PNS, CPNS, TNI-Polri dan pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan. Kemarin hari Rabu 28 April sudah saya tandatangi," tutur Jokowi. ● gio



Ketua Forwat Andi Lala, saat memberikan bingkisan kepada anak yatim dan piatu.